



PERAN INTELIJEN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA SOSIAL KONFLIK SEPARATISME DI PAPUA

Yurika Oktaviayunira, Fauzi Bahar, Arief Budiarto, Pujo Widodo, Wilopo

Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

Abstrak

Intelijen memiliki peran vital dalam menangani konflik gerakan separatis. Dalam konteks ini, peran intelijen mencakup pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi untuk memahami dan mengatasi tantangan yang muncul dari gerakan separatis. Intelijen sangat penting dalam menangani separatisme di Indonesia karena membantu pemerintah memahami situasi sosial, ekonomi, dan politik di daerah rawan separatisme serta memantau dan memetakan kelompok-kelompok yang terlibat. Intelijen juga mendukung pemerintah dalam mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi separatisme, seperti menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup analisis literatur terkait peran intelijen dalam penanggulangan konflik separatisme di Papua.

Kata Kunci: Peran, Intelijen, Separatisme, Papua.

PENDAHULUAN

Dinamika lingkungan strategi global berjalan begitu cepat sehingga telah menggeser suatu paradigma bahwa ancaman itu saat ini telah bersifat multidimensional. Merujuk pada Buku Putih Pertahanan Indonesia bahwa ancaman dapat dibedakan menjadi ancaman militer dan ancaman nir militer atau yang lebih dikenal juga dengan ancaman non militer. Baik ancaman

militer maupun ancaman nir militer tentunya sangat membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup dalam kehidupan bangsa dan negara.

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Selaras dengan yang diamanatkan Undang-Undang tersebut, penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana sangat penting. Hal ini

*Correspondence Address : yurikaoktaviayunira@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i6.2024.2214-2219

© 2024UM-Tapsel Press

dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari setiap ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya suatu penanggulangan bencana terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Konflik adalah salah satu masalah sosial yang sering terjadi dalam kehidupan dan menjadi bagian dari hidup manusia yang bersosial dan berpolitik. Setiap negara akan menghadapi konflik, salah satu bentuknya adalah separatisme. Separatisme merupakan usaha kelompok untuk memisahkan diri dari negara induknya. Orang yang terlibat dalam gerakan ini disebut separatis dan tujuan utamanya adalah mendirikan negara baru. Hal ini dianggap sebagai ancaman bagi keamanan negara karena dapat menyebabkan kekacauan, serta mengancam keutuhan dan kedaulatan negara.

Gerakan separatis di Papua merupakan ancaman bagi kedaulatan dan keutuhan NKRI. Gerakan ini membawa cita-cita untuk menentukan nasib penentuan sendiri dan memisahkan diri dari Indonesia. Pemerintah Indonesia dari masa ke masa telah melakukan berbagai upaya dengan macam-macam pendekatan yang ditempuh. Menurut hukum, NKRI saat ini telah kuat posisinya untuk mensahkan integrasi Irian Barat ke Indonesia yang sejak awal melalui *de facto* dan *de jure* oleh PBB.

Berangkat dari pernyataan di atas, jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan gerakan separatis di Papua dalam konteks ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan NKRI. Dinamika yang terjadi mengharuskan pemahaman mendalam mengenai ancaman yang bersifat militer maupun nir militer. Ancaman gerakan separatis ini membutuhkan pendekatan komprehensif untuk menanggulanginya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami, menganalisis, dan mengidentifikasi peran yang dimainkan oleh intelijen dalam penanggulangan bencana sosial konflik separatisme di Papua.

METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber dan mengkonstruksi informasi dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya (Fadli, 2021). Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung gagasan yang diajukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Separatisme di Papua

Gerakan separatisme merupakan ancaman yang serius bagi NKRI. Secara umum, konflik separatisme menggambarkan keinginan untuk memisahkan diri dari negara atau bagian dari negara tersebut. Istilah separatisme merujuk pada dorongan individu atau kelompok untuk mencapai kemerdekaan mereka sendiri. Dalam konteks politik, gerakan separatisme muncul sebagai

ekspresi keinginan untuk menentukan nasib sendiri dan tidak terikat pada kesatuan negara. Paham separatisme berpotensi mengarahkan suatu negara menuju disintegrasi bangsa dan mengancam keamanan nasional. Terjadinya konflik separatistis di tanah Papua menjadi suatu bencana bagi negara Indonesia yang saat ini masih terus berlanjut mengencangkan upaya penyelesaian konflik demi mempertahankan kedaulatan negara yaitu teritorial.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara bahwa ayat (1) berbunyi: "Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara." Sehubungan dengan hal di atas, pemerintah bertanggungjawab dalam menyusun strategi pertahanan untuk mewujudkan keamanan nasional terhadap aksi separatisme yang bergejolak di Papua.

Konflik sosial di Papua telah terjadi puluhan tahun di Indonesia dan memiliki akar histori yang panjang. Dalam mewujudkan keamanan nasional, pemerintah Indonesia melakukan berbagai bentuk cara untuk menyelesaikan konflik, salah satunya menggunakan pendekatan keamanan (*security approach*). Konsep keamanan dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman konflik separatistis di Papua menjadi agenda pemerintah Indonesia dengan mengerahkan kemampuan militer untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh warga negaranya dari ancaman militer maupun ancaman nir-militer yang disebabkan oleh konflik separatistis.

Peran Intelijen dalam Menanggulangi Gerakan Separatis di Papua

Intelijen sangat penting dalam proses pengolahan informasi. Kegiatan dan operasi intelijen mencakup penyelidikan ancaman, pengamanan, pencegahan, dan mitigasi. Ini bertujuan untuk menjaga keamanan dari bahaya yang disebabkan oleh alam, tindakan manusia, dan konflik sosial (Lemhannas, 2018). Dalam upaya menanggulangi separatisme, intelijen harus berkolaborasi dengan aparat keamanan dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menghadapi ancaman tersebut. Selain itu, intelijen juga harus memperhatikan aspek hukum dan hak asasi manusia dalam setiap tindakannya, agar tidak menimbulkan konflik dan kerugian bagi masyarakat (Kukuh, 2023).

Intelijen bertujuan untuk memetakan kondisi suatu wilayah atau kelompok masyarakat serta menghitung sikap dan kecenderungan sosial politik mereka. Pembentukan satuan tugas gabungan dari berbagai unit intelijen (BIN, BAIS TNI, intelijen satuan, dan intelijen kewilayahan) dalam operasi intelijen TNI di Papua sangat penting untuk mendapatkan informasi intelijen yang faktual, terkini, rinci, dan lengkap.

Adanya intelijen pada suatu negara khususnya NKRI adalah untuk lebih menjelaskan atau memberikan arti secara otentik di bidang keamanan telah diatur dalam UUD 1945 yang menetapkan bahwa negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia. Dari dasar tujuan di atas, intelijen memiliki peranan yang sangat penting dalam lingkup keamanan nasional suatu bangsa.

Intelijen berperan untuk menganalisis dan memberikan hasil analisis tersebut yang kemudian diserahkan kepada pengambil keputusan. Intelijen membutuhkan kecepatan, bersifat real time, lengkap, serta akurat dalam menyajikan prediksi mengenai peringatan dini dari tiap ancaman dan gangguan yang mengancam keamanan nasional. Intelijen juga harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan bahan referensi yang dapat menentukan departemen keamanan dalam melaksanakan kebijakan manajemen nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional (Purwanto, 2021).

Dalam mewujudkan keamanan nasional, intelijen berperan sebagai lini terdepan dalam pertahanan sistem keamanan nasional. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia. Selain itu, intelijen juga memuat setiap indikasi maupun bentuk ancaman potensial terhadap negara. Intelijen berperan dalam mengarahkan pengambil kebijakan untuk membuat keputusan yang tepat dan akurat sesuai informasi intelijen.

Dengan penetapan gerakan separatis di Papua sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dianggap sebagai teroris, strategi TNI di lapangan mengalami perubahan signifikan. Saat ini, TNI menggunakan pendekatan "*counter terrorism*" yang disusun berdasarkan pola operasi intelijen, yang harus didukung oleh operasi teritorial agar dapat menghadapi anggota KKB yang masih aktif dan memutus jaringan kelompok mereka.

Strategi Intelijen dalam Menanggulangi Gerakan Separatis di Papua

Satuan intelijen yang bertugas di Papua saat ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain: Intel Wilayah yang melibatkan Den Intel Kodam, Sat Intel

Korem, serta Unit Intel Kodim, dan juga intelijen satuan organik lainnya seperti Satgas Intel Bais TNI yang terdiri dari beberapa Satgas. Unsur-unsur ini bekerja bersama dalam intelijen gabungan dengan sasaran sesuai dengan tugas masing-masing, dengan tujuan untuk mengungkap dan memutus mata rantai dukungan dari masyarakat Papua terhadap gerakan separatis di Papua. Operasi intelijen yang terpadu oleh Intelijen TNI dan Intelkam Polri menggunakan pendekatan emosi, sikap, perilaku, dan motivasi para pemimpin daerah yang cenderung mendukung kelompok separatis. Operasi intelijen juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mengungkap jaringan kelompok separatisme yang berhasil merasuki berbagai kalangan, baik di lingkungan pemerintah maupun dalam organisasi politik dan swasta (Prasetya, 2022).

Fungsi intelijen yang dilakukan oleh satuan tugas intelijen terpadu dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi kementerian/lembaga yang melaksanakan pembangunan di wilayah Papua. Sebaliknya, unsur kementerian/lembaga di Papua juga dapat menjadi sumber informasi bagi satuan tugas intelijen terpadu. Kemampuan personel intelijen ditentukan oleh seberapa besar peran mereka dalam menjalankan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan ini sangat penting untuk mengatasi gangguan keamanan yang disebabkan oleh kelompok separatis di Papua. Agar peran personel intelijen dapat dioptimalkan, kemampuan intelijen yang diharapkan meliputi:

1. **Penyelidikan:** Satuan yang bertugas mengatasi gangguan keamanan di Papua harus mampu mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, serta menilai dan

mengolah informasi tersebut menjadi data intelijen dengan tepat, cepat, dan akurat.

2. Pengamanan: Satuan tugas harus melaksanakan pengamanan yang efektif terhadap personel, materiil, berita, dokumen, dan kegiatan militer baik yang bersifat taktis maupun strategis, sehingga tidak terjadi kerugian non tempur. Selain itu, mereka harus mampu mempersempit ruang gerak kelompok separatis dan mengidentifikasi kegiatan serta keberadaan mereka secara optimal.
3. Pengolahan Informasi: Personel intelijen harus memiliki kemampuan dalam mengolah informasi dasar intelijen menjadi tindakan operasional yang faktual, sehingga dapat membantu menyelesaikan tugas dalam mengatasi gangguan keamanan akibat kelompok separatis di Papua.

SIMPULAN

Peran intelijen dalam penanggulangan bencana sosial akibat konflik separatisme di Papua sangat krusial dalam proses pengolahan informasi dan pelaksanaan operasi yang mencakup penyelidikan ancaman, pengamanan, pencegahan, dan mitigasi. Intelijen bertujuan untuk menjaga keamanan dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari alam, tindakan manusia, maupun konflik sosial (Lemhannas, 2018). Dalam menghadapi separatisme, kolaborasi antara intelijen, aparat keamanan, dan lembaga terkait lainnya adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi. Aspek hukum dan hak asasi manusia juga harus diperhatikan untuk mencegah timbulnya konflik dan

kerugian bagi masyarakat (Kukuh, 2023).

Intelijen memiliki tujuan untuk memetakan kondisi wilayah atau kelompok masyarakat dan menilai sikap serta kecenderungan sosial politik mereka. Pembentukan satuan tugas gabungan dari berbagai unit intelijen (BIN, BAIS TNI, intelijen satuan, dan intelijen kewilayahan) sangat penting dalam operasi intelijen di Papua untuk mendapatkan informasi yang faktual, terkini, rinci, dan lengkap. Keberadaan intelijen di Indonesia, khususnya di Papua, sesuai dengan UUD 1945 yang menekankan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia.

Satuan intelijen yang bertugas di Papua bekerja secara terpadu untuk mengungkap dan memutus mata rantai dukungan masyarakat Papua terhadap gerakan separatis. Operasi intelijen yang terpadu antara Intelijen TNI dan Intelkam Polri menggunakan pendekatan emosi, sikap, perilaku, dan motivasi para pemimpin daerah yang cenderung mendukung kelompok separatis. Operasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap jaringan kelompok separatisme yang berhasil menyusup ke berbagai kalangan, baik di lingkungan pemerintah, organisasi politik, maupun swasta. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penguatan kapasitas dan koordinasi intelijen, serta pendekatan yang lebih humanis dan inklusif, sangat diperlukan dalam upaya menanggulangi konflik separatisme di Papua. Intelijen harus terus beradaptasi dengan perubahan dinamika sosial dan politik untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi dalam menjaga keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Fadli, Rijal. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1).

Lemhannas. (2018). *Geostrategi dan Ketahanan Nasional: Bahan Ajar Matrikulasi Lembaga Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas.

Nugroho, Kuku. (2023). Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7 (1).

Purwanto, Hari. (2021). *Gejolak Papua dalam Perspektif Intelijen*. Bandung: CV Jakad Media Publishing.

Prasetya, Ari. (2022). *Strategi Satuan Tugas Intelijen Terpadu dalam Mengatasi Gerakan Terorisme di Papua guna Menjaga Kedaulatan Negara*. Universitas Pertahanan.

Satrio, Stefanus. (2022). *Strategi Tentara Nasional Indonesia Mengatasi Aksi Terorisme Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Guna Mendukung Pertahanan Negara*. Universitas Pertahanan.

Wijaya, Asep. (2022) *Strategi Operasi Intelijen Strategis dalam Counterinsurgency Gerakan Separatis Papua*. Universitas Pertahanan.